

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diuraikan. Menurut Sharp dalam (Kuncoro, 2011), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas dalam sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang ada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang umum terjadi pada semua negara sedang berkembang. Kemiskinan timbul karena kesenjangan masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sampai pada titik taraf yang dianggap manusiawi. Situasi ini mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang dimiliki rendah. Sehingga dalam kebijakan perlindungan sosial yang merupakan elemen penting dalam pengetasan kemiskinan (Suharto, 2006).

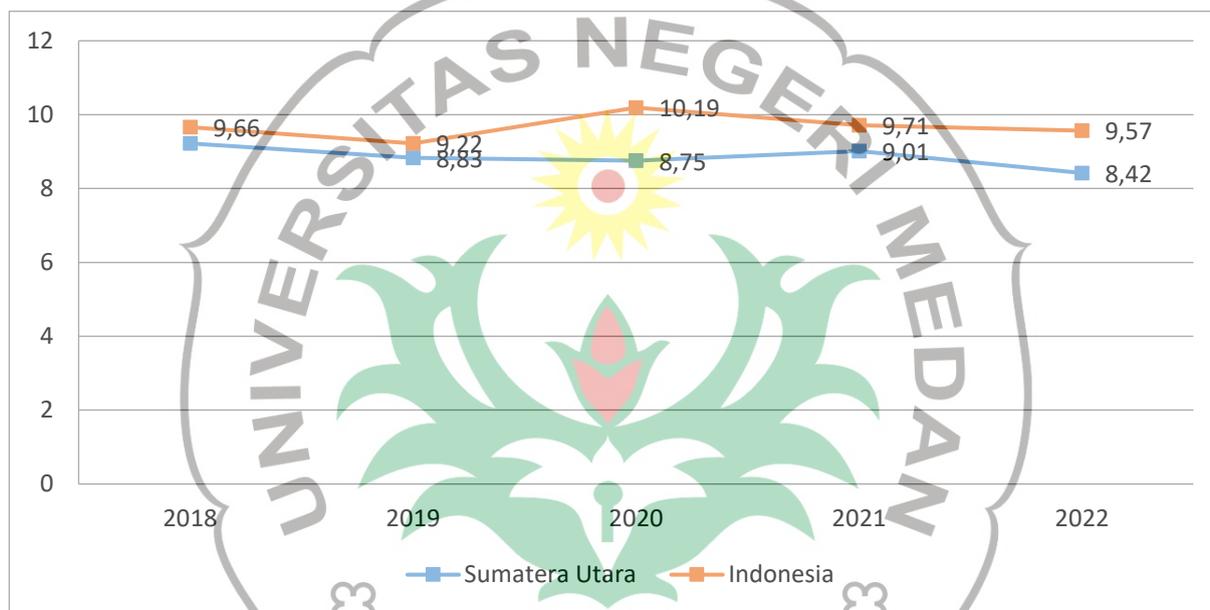
Kemiskinan dapat mengacu pada keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan kurangnya literasi pemahaman mengenai gaya hidup sehat

merupakan salah faktor minimnya tingkat kesehatan masyarakat. Dalam skala multidimensional ada peningkatan dalam kualitas pendidikan yang mengakibatkan ketidaksetaraan pada wilayah, kota, dan desa yang masih tinggi. Perbedaan pendidikan antara penduduk yang kaya dan miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan masih cukup besar. Minimnya peluang kerja dan usaha masih menjadi salah satu permasalahan. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyat, 2016).

Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan-keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, serta suramnya bangsa dan negara. Kemiskinan tersebut juga menjadi masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak menyebabkan Indonesia mengalami beberapa masalah sosial seperti kemiskinan.

Character Building
UNIVERSITY

Berikut grafik data perkembangan persentase penduduk miskin Sumatera Utara dan Indonesia dimulai dari tahun 2018-2022.



Gambar 1.1 Tingkat Persentase Kemiskinan di Indonesia & Sumatera Utara 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun 2018 sampai 2022 untuk wilayah Sumut dan Indonesia. Dari grafik tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin untuk setiap wilayah amatan cenderung naik turun, mengalami penurunan di tahun 2019, meningkat tinggi pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase penduduk miskin di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2018-2022. Secara umum kenaikan yang terjadi antara 2020 dan 2021 dipicu oleh *Covid-19* yang memang berdampak pada seluruh wilayah Sumatera Utara bahkan sampai

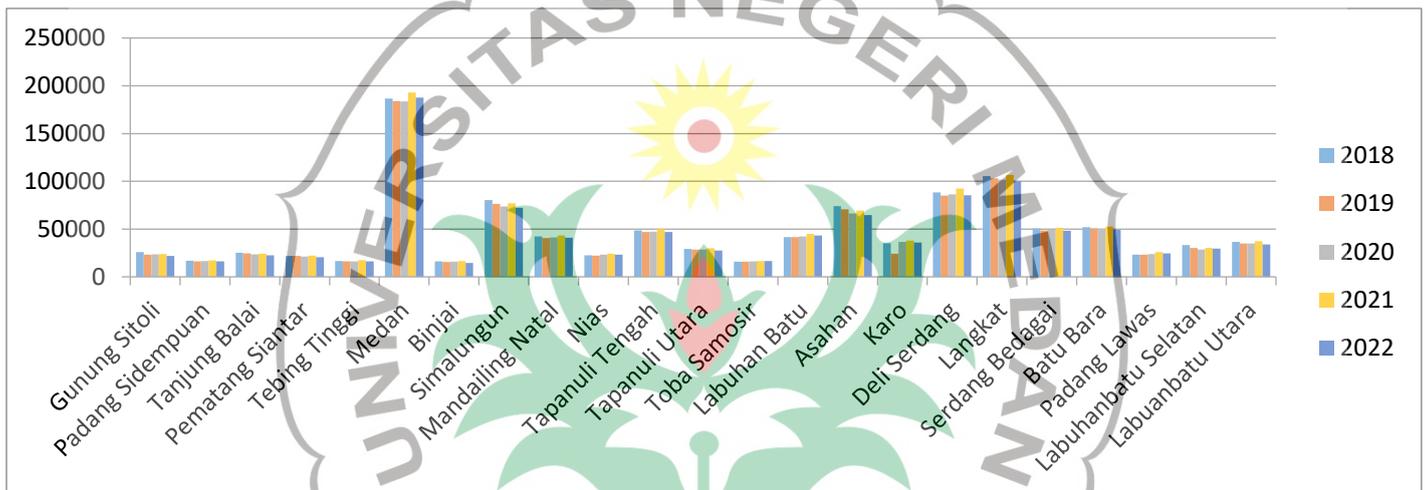
Indonesia. Pada masa tersebut terjadi krisis global yang memicu salah satunya resiko tingkat kemiskinan terjadi.

Upaya kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk tetap dirumah dengan dilakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengharuskan masyarakat untuk tetap dirumah atau karantina menyebabkan ketakutan massal terhadap *Covid-19* pada masyarakat terkait perekonomian dalam tiap keluarga menurun dan kekurangan bahan pangan untuk dikonsumsi sehingga terjadi peningkatan simpanan pangan yang selanjutnya menyebabkan kenaikan harga pangan itu sendiri. Individu ataupun kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak memiliki solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk diantaranya ketidakmampuan memperoleh sumber daya kesehatan dan sanitasi sehingga memicu bertambahnya orang masuk dalam lingkaran kemiskinan (Anser, 2020).

Hingga pada tahun 2021 ketika *Covid-19* selalu menjadi sumber masalah pemerintah terus melakukan pemulihan dari sisi ekonomi untuk mengatasi dampak yang di sebabkan oleh pandemi khususnya terhadap kemiskinan.

THE
Character Building
UNIVERSITY

Berikut sebaran jumlah penduduk miskin untuk tiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumut dalam rentang tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Sumber: BPS Sumatera Utara

Dari grafik diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada kota Medan sebanyak 193.030 pada tahun 2021 jiwa. Serta jumlah penduduk miskin terendah pada Kota Binjai sebesar 14.610 jiwa. Hal ini dikarenakan pandemic *Covid-19* yang membawa dampak signifikan di berbagai sektor sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten dan kota Sumatera Utara tahun 2022 mengalami fluktuasi. Kemiskinan muncul karena keahlian individu sebagai eksekutor berbeda, dengan kata lain individu tersebut belum mampu untuk berpartisipasi dan ikut serta pada saat pengembangan atau mengambil manfaat dari hasil pembentukan.

Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan pada umumnya tidak memadai.

Pengangguran menurut (Mankiw, 2006) adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Ketika permasalahan tersebut dibiarkan dan terus meningkat pada setiap tahun dapat menimbulkan dampak yang kurang baik pada suatu wilayah maupun negara. Beberapa kasus yang ditimbulkan dengan adanya pengangguran adalah kejahatan dan kemiskinan.

Hubungan antara jumlah pengangguran, pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial, upah minimum provinsi, dan tingkat kemiskinan dapat bervariasi di setiap negara dan wilayah. Secara umum, ada beberapa hubungan yang bisa diidentifikasi. Ketika banyak orang menganggur, mereka memiliki pendapatan yang rendah atau tidak ada pendapatan sama sekali, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan.

Berikut sebaran jumlah pengangguran untuk tiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumut dalam rentang tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Jumlah Pengangguran

Sumber: BPS Sumatera Utara

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat jumlah pengangguran tiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengalami flukutasi yang berbeda. Jumlah pengangguran tertinggi pada kota Medan sebanyak 121.823 jiwa pada tahun 2021. Dan yang paling rendah terdapat pada kabupaten Nias sebesar 778 jiwa pada tahun 2018. Hal ini diperkuat oleh teori (Sukirno, 2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Kemiskinan dan tenaga kerja saling berkaitan, hal ini dapat dilihat hubungan antara kemiskinan dengan pengangguran. Pengangguran dan setengah

pengangguran merupakan indikator yang dipilih berdasarkan dengan fakta yang menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki keterkaitan dengan pendapatan seseorang. Seseorang yang belum memiliki pekerjaan dan masih mencari pekerjaan tidak mendapatkan pendapatan, sedangkan separuh menganggur berhubungan pada ringkasnya jam kerja dengan pendapatan yang diterima. Tingkat kemiskinan selalu terus beranjak selaras dengan tingkat pengangguran. Karena pada saat taraf pengangguran mengalami penambahan mengakibatkan tingkat kemiskinan mengalami peningkatan (Berliani, 2021).

Pada penelitian ini indeks yang dilihat dan dihitung untuk mengukur pengangguran adalah Jumlah Pengangguran. Dimana hal tersebut menghasilkan petunjuk banyaknya individu yang memasuki usia kerja masuk kedalam pengangguran. Penelitian (Khamilah, 2018) diperoleh hasil bahwa tingkat nilai pengangguran terbuka mempunyai dampak positif dan signifikan pada nilai tingkat kemiskinan di Wilayah Kalimantan Selatan. Setiap naiknya angka pengangguran menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat, ini disebabkan jumlah peningkatan pengangguran baru masuk lapangan pekerjaan bertambah.

Hal ini bertentangan dengan hasil yang ada, yang terjadi pada salah satu kabupaten di Simalungun jumlah pengangguran mengalami kenaikan sedangkan pada jumlah penduduk miskin dapat ditekan dan mengalami penurunan. Sehingga diperkuat kembali dalam penelitian (Yacoub, 2012) menjelaskan adanya nilai tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikansi pada nilai tingkat kemiskinan di Wilayah Kalimantan Barat. Pengangguran disebabkan akibat sebagian dari pekerja hingga saat ini masih berkuat pada sektor pertanian

dan pendidikan yang kurang memadai sehingga dengan mengikut sertakan sebagian anggota keluarga yang dimiliki namun pendapatan dan pengetahuan yang dimiliki belum dapat mencukupi kebutuhan dan menaikkan tingkat taraf hidup yang sejahtera, dan bisa memberikan kebijakan publik berupa memberikan bantuan sosial.

Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas (Norton, 2001). Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang Layak (Organization, 2012).

THE
Character Building
UNIVERSITY

Berikut sebaran realisasi biaya perlindungan sosial untuk tiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumut dalam rentang tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4 Grafik Realisasi Biaya Perlindungan Sosial

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id.

Pada tabel diatas dapat dilihat penerimaan pada biaya perlindungan sosial tiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengalami flukutasi yang berbeda. Penerimaan biaya pendidikan tertinggi terdapat pada kota Medan sebesar Rp.135.072.091.423 pada tahun 2019. Dan yang paling rendah terdapat pada kabupaten Gunung Sitoli sebesar Rp.3.966.612.371 pada tahun 2020. Dalam amanat Pemerintah pusat melalui UUD 1945 pasal 31 ayat 4 untuk mengalokasikan dana sebesar 20% dari total belanja pemerintah pusat dan daerah pada bidang pendidikan demi meningkatnya kualitas SDM masyarakat yang nantinya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Pada penelitian (Aini, 2020) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial terhadap kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil yang ada berbeda dari kenyataan yang ada, pada kota Medan jumlah tertinggi biaya perlindungan sosial sebesar Rp.135.072.091.423 akan tetapi jumlah penduduk miskin juga bertambah sebesar 193.030 jiwa pada tahun 2021. Sehingga diperkuat kembali pada hasil penelitian (Taruno, 2019) variabel pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial berupa bantuan Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Penyebab kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ialah rendahnya upah bagi tenaga kerja. Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Sehingga upah minimum merupakan salah satu indikator untuk mengatasi tingkat kemiskinan (Panjawa, 2014). Upah ini menjadi suatu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Upah bagi pekerja sangat penting karena itu merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya serta menjadi sumber pembelanjaan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama bagian Provinsi Sumatera Utara, pemerintah harus memperhatikan tingkat upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan

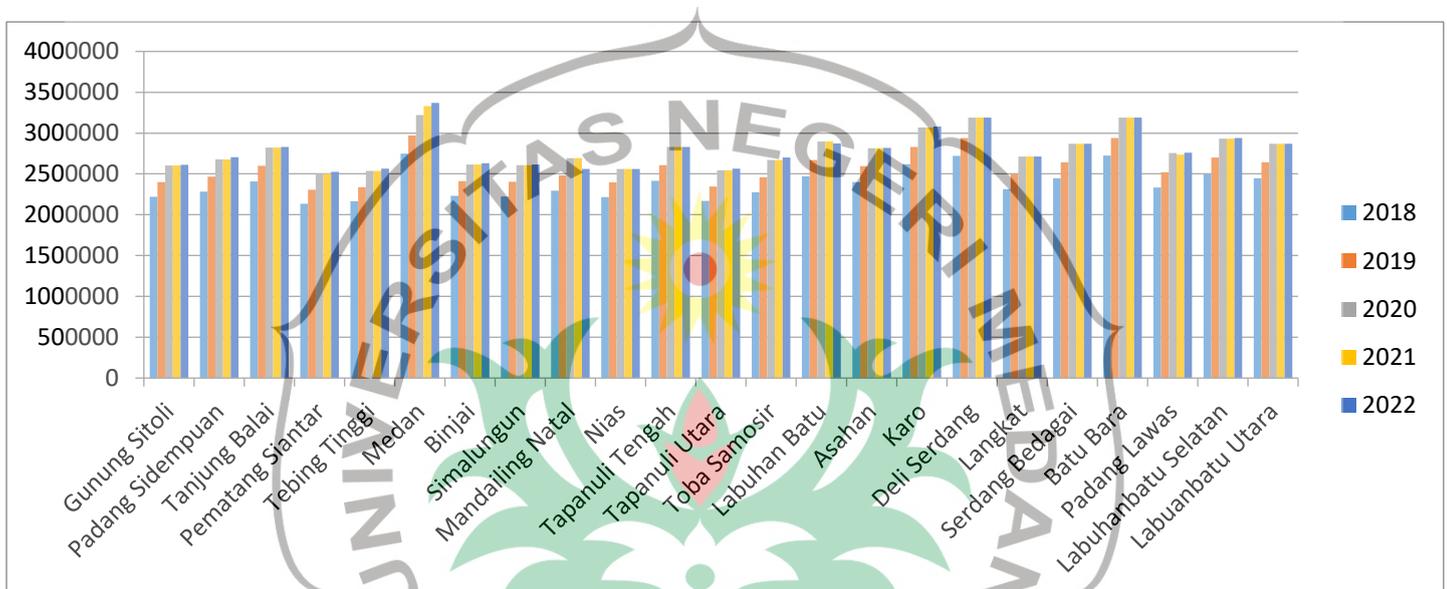
masyarakat serta harga barang dan jasa karena tinggi rendahnya upah akan menjadi faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik atau sebaliknya (Said, 2017).

Pemberian upah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menghindari masyarakat dari masalah sosial yang berhubungan dengan perekonomian seperti kemiskinan. Masyarakat dengan upah minimum yang rendah dalam suatu daerah atau wilayah memiliki standar hidup dengan tingkat konsumsi yang rendah juga, dan sebaliknya jika upah minimum tinggi maka masyarakat daerah ataupun wilayah tersebut memiliki standar hidup serta tingkat konsumsi yang tinggi pula. Melalui pemberian Upah Minimum akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat meminimalisir masalah kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor-faktor diantaranya: Pengangguran, rendahnya sumber daya manusia (SDM) akibat rendahnya IPM, minimnya lapangan pekerjaan, dan kekurangan modal untuk membuka usaha sehingga menyebabkan produktivitas barang rendah dan pendapatan yang mereka terima juga rendah (Yusuf.Y, 2014).

Character Building
UNIVERSITY

Berikut tabel Upah Minimum Provinsi pada Sumatera Utara tahun 2018 -

2022:



Gambar 1.5 Upah Minimum Provinsi

Sumber: BPS Sumatera Utara

Pada tabel diatas dapat dilihat Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara selalu mengalami peningkatan. Upah minimum provinsi tertinggi terdapat pada kota Medan sebesar Rp.3.370.645 dan yang paling rendah terdapat pada kota Pematang Siantar Rp.2.133.977 pada tahun 2018. Hal ini tidak sejalan dengan teori *Minimum Wages and Poverty in a Developing Country: Simulations from Indonesia's Household Survey* oleh (Manning, 2008) menggunakan metode simulasi didapatkan kesimpulan bahwa kebijakan upah minimum bukan merupakan kebijakan efektif untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Putria, 2021) Ditemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil ini berbeda dengan kenyataan yang ada pada kota Medan terlihat bahwasannya Upah Minimum mengalami kenaikan akan tetapi jumlah penduduk miskin juga mengalami kenaikan. Sehingga diperkuat kembali pada penelitian (Hanifah, 2021) yang mengatakan upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sehingga *research gap* dan *gap data* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut upah minimum terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Untuk mengetahui menelusuri serta memahami dampak dari tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan upah minimum terhadap persentase penduduk miskin pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara secara individu dan keseluruhan maka alat analisis yang paling cocok digunakan adalah metode teknik analisis regresi data panel. Regresi data panel menggabungkan data *time series* dan *cross section* untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif dan beragam. Metode ini memiliki derajat kebebasan yang tinggi, efisiensi yang lebih baik, dan akurasi dalam mendeteksi serta menilai efek dengan cara yang sederhana (Baltagi, 2008).

Dari pendapat ahli dan hasil riset empiris yang mengaitkan antara jumlah pengangguran, pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin. Namun, beberapa hasil riset peneliti terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*), bahkan (*gap data*) yang berlawanan dengan arah teori. Melihat hal tersebut maka tingkat persentase penduduk miskin dengan faktor yang mempengaruhinya menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu maka akan dilakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Jumlah Pengangguran, Realisasi Biaya Perlindungan Sosial, Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pandemi *Covid-19* menyebabkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk miskin.
3. Terdapat hubungan yang terbalik antara realisasi biaya perlindungan sosial dengan jumlah penduduk miskin.
4. Terdapat hubungan terbalik antara upah minimum provinsi dengan jumlah penduduk miskin.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh dari variabel jumlah pengangguran realisasi biaya perlindungan sosial dan upah minimum provinsi (UMK) terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai 2022.
2. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.
3. Data penelitian ini diambil dari Dirjen Kementerian Keuangan Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah ada pengaruh jumlah pengangguran memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Utara.
2. Apakah ada pengaruh realisasi biaya perlindungan sosial memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Utara.
3. Apakah ada pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Utara.
4. Apakah ada pengaruh jumlah pengangguran, realisasi biaya perlindungan sosial dan, upah minimum provinsi (UMK), memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Utara.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengangguran memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh realisasi biaya perlindungan sosial memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengangguran, realisasi biaya perlindungan sosial, dan upah minimum, memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam dilakukan penelitian ini ditulis dengan memiliki tujuan agar bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Orientasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki ilmu pengetahuan, pemahaman dan informasi penting kepada pihak yang membaca yang memiliki kepentingan khusus dalam pengembangan mengenai pengaruh jumlah pengangguran, realisasi biaya perlindungan sosial dan, upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti terkait pengaruh jumlah pengangguran, realisasi biaya perlindungan sosial dan, upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan guna untuk mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara.

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan studi lebih lanjut agar memiliki pengembangan penelitian mengenai tema yang sama.